

PERAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA MEDAN

Lily Purnama¹, R. Hamdani Harahap², Beti Nasution³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

¹Jl. Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: lilypurnama@student.usu.ac.id

ABSTRACT

People's Business Credit (KUR) is a government program to increase Small, Micro, and Medium Enterprises (UMKM). Micro Business Loan (KUR) is a credit for financing productive business segment of micro, small, medium, and cooperative feasible but not yet bankable for working capital and / or investment credit through direct and indirect financing pattern (linkage) guaranteed by Lembaga Penjamin Kredit. This study aims to examine how the implementation of KUR distribution and its role in the empowerment of women. This research uses mixed methods method. The sample in this research was 71 respondents who were drawn using Taro Yamane formula with precision 0,1. The location of this research is PT. Bank Mandiri branch of Medan Iskandar Muda (Tbk). The results of this study show that the distribution system of KUR PT. Bank Mandiri branch of Medan Iskandar Muda (Tbk) through nine stages using the 5 C standard (Capital, Collateral, condition, character, capacity) as the implementation guideline. The results of the study of obtaining the KUR program have a good impact on the business development and personal debtor. This is because the survey system conducted on an ongoing basis by PT. Bank Mandiri branch of Medan Iskandar Muda (Tbk) forced the debtor to discipline in financial management.

Keywords: Banking, Women, Credit, Empowerment.

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Kredit Usaha Mikro (KUR) adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segment mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak/ feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi penyaluran KUR dan peranannya dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 responden yang ditarik menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 0,1. Lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri cabang Medan Iskandar Muda (Tbk). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem penyaluran KUR PT. Bank Mandiri cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) melalui sembilan tahapan yang menggunakan standar 5 C (Capital, Collateral, condition, character, capacity) sebagai pedoman pelaksanaan. Hasil penelitian mendapatkan program KUR memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan usaha dan pribadi debiturnya. Hal ini dikarenakan sistem survei yang dilakukan secara berkesinambungan oleh PT. Bank Mandiri cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) memaksa debitur untuk disiplin dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Perbankan, Perempuan, Kredit, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Salah satu bank di Indonesia yang bertindak sebagai penyalur KUR adalah PT Bank Mandiri (Persero). Melihat begitu banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal sebagai modal usaha, Bank Mandiri juga turut memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memiliki Usaha Mikro untuk bisa mengajukan pinjaman KUR. KUR sendiri merupakan sebuah usaha pemerintah untuk meningkatkan geliat Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed



yang ditandai dengan keputusan sidang kabinet pada tanggal 5 November 2007. Kredit Usaha Mikro (KUR) adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segment mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak / feasible namun belum *bankable* untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikutan penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Sedangkan pihak ketiga yaitu bank Penyalur terdiri dari tujuh 7 bank Umum dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 13 BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua (kur.ekon.go.id).

PT Bank Mandiri (Persero) sendiri dalam proses penyaluran KUR memberikan kemudahan persyaratan dengan 2 (dua) bentuk jenis kredit yaitu investasi dan modal kerja. Persyaratan yang diberikan PT Bank Mandiri (Persero) juga mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan pemberian limit yang mencapai Rp. 2.000.000.000,00 memberikan berbagai kemudahan para calon debitur khususnya kaum perempuan untuk mengkonsepkan jenis usaha yang ingin mereka bentuk dengan lebih mapan dan mandiri.

Konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Melihat berbagai fenomena yang menarik dalam proses penyaluran KUR pada masyarakat khususnya kaum perempuan membuat penulis ingin mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran KUR yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) khususnya yang dikelola oleh PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Medan Iskandar Muda. Studi ini mengkaji peranan Lembaga Perbankan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Kota Medan.

KAJIAN TEORI

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah “membantu” komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas (Nasdian, 2006). Berarti pemberdayaan adalah bagaimana membuat komunitas bisa bekerja sendiri berdasarkan kemampuan yang telah mereka miliki. Tetapi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed



sebelumnya kemampuan komunitas harus ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi dan menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan nanti. Sehingga mereka dapat menentukan dan merancang masa depan mereka sendiri.

Sulistiyani (2004) menyatakan Daya sebagai suatu kemampuan dimiliki oleh masyarakat, agar dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Randy & Riant, 2007).

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan. Artinya, perlu ada suatu tahapan dimana setiap tahap terjadi proses perkembangan menuju perbaikan. Proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama dan partisipasi menyeluruh dari komunitas itu sendiri. Tidak bisa dijadikan dalam waktu sehari atau hanya sekadar mengenalkan program ke komunitas, kemudian hilang sampai program berikutnya datang. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Randy & Riant, 2007).

Kesadaran Perempuan Untuk Berperan Serta dalam Perekonomian

Secara umum masih sedikit diantara kita yang menyadari bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *spesifik gender*, yaitu persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan. Tidak saja di kalangan laki-laki, tapi kaum perempuan sendiri yang masih banyak tidak menyadari hal tersebut, sehingga memandang tidak perlu persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena mendalamnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap sudah kodratnya perempuan sebagai *ratu rumah tangga*,

Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Dalam hal keterlibatan perempuan Indonesia dalam dunia usaha atau sebagai pengusaha/wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu wanita telah terjun dalam dunia perdagangan.

Wanita potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan, untuk itu potensi perempuan perlu ditingkatkan atau paling tidak dikurangi penyebab-penyebab mengapa perempuan sulit maju dalam karier bagi perempuan bekerja dan sulit maju usahanya bagi perempuan pelaku usaha. Menurut Cakrawala Cinta (Ide Usaha Kecil dan Madya, 1994), terdapat perbedaan penting yang menentukan jiwa kewiraswastaan, antara pria dan wanita, yang mana kebanyakan wanita sulit untuk maju karena :1). Wanita kurang diajar bersaing, 2).Wanita terlalu melihat detail perkara-perkara kecil, 3). Wanita emosional dalam situasi yang tidak tepat, 4).Wanita kurang berani mengambil resiko, 5).Wanita kurang cukup agresif, 6).Mereka lebih senang bereaksi daripada mengambil inisiatif, 7).Wanita lebih berorientasi pada tugas dari pada tujuan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods* dengan jenis sekuensial bertahap (*sequential mixed methods*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang diambil dari daftar Kelompok Keuangan Mikro (KKM) yang berada dibawah naungan PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Medan Iskandar Muda dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan total 246 debitur. Sampel menggunakan rumus Taroyamane dengan hasil penjumlahan sampel sebanyak 71 responden. Pengumpulan data menggunakan Wawancara, kuesioner dan observasi. Data di analisis menggunakan teknik Miles dan Huberman serta analisis melalui program SPSS versi 16.0.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed



PEMBAHASAN

Potensi Perempuan di Bidang Ekonomi

Menurut Lauster (2002:4) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan oranglain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan oranglain, optimis dan gembira.

"...jualan ini sebenarnya memang udah pengen dari dulu. Kayak memangyakin aja jalan rejekinya di sini. Lagan ibu nengok di sini gak ada grosir. Lagian liat anak juga masih kasian buk, masih banyak kebutuhannya. Makanya dari pada nganggur ya mendingan usaha. Makanya langsung buat grosir di sini. Alhamdulillah lancar sampai sekarang..."

(hasil wawancara dengan Ibu Rita Juningsih, debitur KUR PT. Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda pada : 1 Agustus 2017)

Percaya diri (*Selfconfidence*) merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertindak laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. Hal senada juga diungkapkan oleh Mega Iryani:

"...jujur saya memang punya cita-cita berdagang mulai SMA. Namun sejak nikah ini saya sulit mendapatkan kesempatan untuk berdagang. Disamping waktu yang hampir habis untuk balita dan suami, modal juga kurang. Sebenarnya agak ragu pertama untuk mulai usaha dengan kredit bank. Ini kredit pertama saya dengan suami. Makanya saya agak grogi. Namun saya pede aja, orang lain bisa kenapa saya tidak, kan gitu..."

Kepercayaan diri menurut ahli bernama Anthony (1992) yaitu sikap pada diri seseorang yang dapat/bisa menerima kenyataan, mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu yang di inginkan.

Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk)

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu". Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Tahap ini merupakan kegiatan yang sangat disiplin dilakukan PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk). Setidaknya ada 9 (sembilan) tahapan yang dilalui calon debitur yang akan mengajukan KUR. *Mikro Kedit Analisis* (MKA) sebagai pihak yang bertugas menganalisis daya calon debitur dalam mengikuti program KUR. Tahap ini sangat berpengaruh pada kesinambungan program karena calon debitur akan dapat mengetahui seberapa daya yang dia miliki dalam melaksanakan program KUR. Sehingga dalam pelaksanaannya program KUR akan dapat berjalan dengan efektif.

Harus diakui bahwa banyak masyarakat yang berniat mengajukan kredit tanpa melihat daya yang dia miliki dalam melaksanakan program. Bahkan kredit yang tadinya dianggap dapat membantu

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed



meningkatkan perekonomian malah berubah menjadi bumerang bagi ekonomi rumah tangga. Padatahap inilah *Mikro Kredit Analisis* (MKA) sangat berperan untuk memberikan analisis dan penjelasan tentang daya yang dimiliki calon debitur.

2. Tahap Pengkapasitasan

Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana memungkinkan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Namun dalam prakteknya PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) tidak melaksanakan tahap pengkapasitasan dalam proses penyaluran KUR. PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) hanya melihat rekam jejak calon debitur melalui sistem *BI Checking* untuk selanjutnya melihat kelengkapan berkas pengaju kredit dan usaha yang dimilikinya. Pada tabel 17 jelas dapat dilihat bagaimana mayoritas responden mengaku tidak pernah mendapatkan program pelatihan dari PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk).

Secara nasional PT Bank Mandiri (Tbk) telah melihat pengkapasitasan merupakan sebuah aspek yang penting dari rangkaian kegiatan pemberdayaan. Saat ini di wilayah Jabodetabek PT Bank Mandiri (Tbk) telah gencar melaksanakan kegiatan pengkapasitasan dalam bentuk pengelolaan keuangan, produksi, dan promosi bagi pelaku UMKM yang menjadi debiturnya.

3. Tahap Penguatan

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri-atau "*empowerment*" dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pemberian kredit kepada suatu kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha.

Tahap ini merupakan tahap dimana KUR memang telah dianggap layak disalurkan kepada debitur PT Bank Mandiri (Tbk) melalui *Mikro Kredit Analisis* (MKA). Melalui basis data calon debitur yang sebelumnya dikumpulkan melalui sistem *BI Checking* dan hasil analisis *Mikro Kredit Analisis* (MKA) maka penyaluran kredit dapat benar-benar dapat disalurkan kepada debitur yang dianggap layak.

KESIMPULAN

Studi yang telah dilakukan ini menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) menggunakan seluruh media untuk menyebarkan seluruh informasi mengenai KUR. Hal ini dilakukan agar KUR dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Dalam penyalurannya PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) melalui standar 5C yaitu *Capital, Collateral, Condition character*. Aspek ini dinilai seorang *Micro Credit Analisis* (MCA).
3. Responden dalam penelitian menilai bahwa penyaluran KUR oleh PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.11 dan 4.12.
4. Jika melihat distribusi jawaban responden pada tabel 4.13, tabel 4.14, 4.15, dan 4.16 menunjukkan bahwa debitur KUR PT Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda (Tbk) merupakan debitur yang siap secara individu untuk berwirausaha secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdurrachman A. 1993. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta: Yagrat
Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed



- Dahlan Siamat, 2004. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Endang Mintorowati. 1996. Hukum Perjanjian. Surakarta: UNS Press Gunarto
- Suhardi. 2007. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
- Fakih, Mansour. 2012. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntansi Akuntansi, 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 19. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, 1998, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2007. Dasar-Dasar Perbankan, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristanti, Etik. 2013. “Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat”, Semarang.
- Kusnandar, Engkus. 2012. “ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (KUR) oleh Perbankan” , Semarang.
- Nikmah, Sukarno dan Mufidah . 2014. “ Analisis Implikasi Penyaluran KUR pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember” , Semarang.
- Rivai, Veithzal, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putranto, Diajeng Sarsa. 2013, Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran KUR, Semarang.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. 2004. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Ulum, Ihyau, 2009, Intellectual capital : konsep dan kajian empiris, Cetakan Pertama, Graha Ilmu ,2010. “Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia”. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Endang Mintorowati. 1996. Hukum Perjanjian. Surakarta: UNS Press Gunarto
- Suhardi. 2007. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kanisius.
- H.B. Soetopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press
- Hermansyah. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009
- Johannes Ibrahim. 2004. Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif. Bandung: CV. Utomo
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Djumhana. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Aditya
- Peraturan Menkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta
- Rachmadi Usman. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratri Wulandari. 2003. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta (Skripsi). UII
- Ryan Kiryanto. 2007. Langkah Terobosan Ekspansi Kredit. Jurnal Hukum Bisnis
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung : Alfabeta
- Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research. Jilid II. Yogyakarta : Andi.
- Thomas Suyatno, dkk. 2003. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama